



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 2 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
UNIT KERJA : DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GUNARDI
2. Jabatan : KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
3. NHK : 713708

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 525.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG ,
LAINNYA Rp. 175.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 29 m2/70 m2 di KOTA SEMARANG ,
LAINNYA Rp. 175.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/78 m2 di KOTA SEMARANG ,
LAINNYA Rp. 175.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 215.000.000

1. MOTOR, YAMAHA 1KP A/T Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
2. MOTOR, HONDA NF 125 TR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp.
3.000.000
3. MOTOR, HONDA D1A02N18M1 A/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 6.500.000
4. MOTOR, HONDA Y3B02R17L0 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 9.500.000
5. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA 1.3G M/T Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 95.000.000
6. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.
98.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 774.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----



Sub Total	Rp.	1.514.000.000
III. HUTANG	Rp.	48.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.466.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.